**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Andi Lopa Ginting1**

**Sondang Nauly Hasibuan2**

1Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Pd. Cabe Udik,

Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418

Andi.lopaginting@ecampus.ut.ac.id

2Program Studi Ilmu Ekonomi

Universitas Palangka Raya

Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya,

Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

[Uly22hsb@gmail.com](mailto:Uly22hsb@gmail.com)

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**ABSTRAK**

Andi, Sondang, 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series tahun 2010-2016. Data dianalisis menggunakan path analisis.

Hasil penelitian menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **( 0,001 ).** Pengeluaran pemerintah tidal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(0,008).** kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(0,002).** Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(0,004).** Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(0,001).** Pengeluaran pemerintah tidal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(-0.724).** Kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob **(1.198 ).**

**Kata kunci :** Pengeluaran Pemerintah, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

**THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON ECONOMIC AND POVERTY GROWTH**

**IN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE**

**ABSTRACT**

Sondang Nauly Hasibuan, 2019. Effects of Government Expenditures and Job Opportunities on Economic Growth and Poverty in Central Kalimantan Province.

This study aims to analyze the effect of government spending and employment opportunities on economic growth and poverty in Central Kalimantan Province. The research method is quantitative by using secondary time series data from 2010-2016. Data is analyzed using path analysis.

The results found that government expenditure had a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, so Prob (0.001). Government expenditure does not have a significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.008). Job opportunities have a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.002). Job opportunities have a significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.004). Economic growth has a significant effect on the level of poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.001). Government expenditure does not have a significant effect on poverty levels through economic growth in Central Kalimantan Province, so Prob (-0.724). Job opportunities have a significant effect on poverty levels through mediating economic growth in Central Kalimantan Province, so Prob (1,198).

**Keywords**: Government Expenditures, Job Opportunities, Economic Growth and Poverty

**PENDAHULUAN / *INTRODUCTION***

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna peneyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif dapat diterapkan (Sjafrizal, 2009).

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya Akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman. (Guritno, 1999).

Sejak tahun 2007, struktur belanja pemerintah daerah mengalami perubahan dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja langsung dan tidak langsung, terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. pada Tabel 1.1 dibawah memberikan gambaran jumlahProporsi Belanja Langsung dan BelanjaTidak LangsungTerhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015yaitu:

**Tabel 1.1**

**Proporsi Belanja Langsung dan BelanjaTidak Langsung  
Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun** **2011-2015 (dalam jutaan Rp)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja**  **Langsung** | **%** | **Belanja**  **Tidak langsung** | **%** | **Total** |
| **Belanja Daerah** |
| 2011 | 812.290.457 | 53,29 | 712.053.813 | 46,71 | 1.524.344.270 |
| 2012 | 1.122.281.366 | 47,73 | 1.229.065.954 | 52,27 | 2.351.347.320 |
| 2013 | 1.566.774.812 | 53,50 | 1. 361.950.809 | 46,50 | 2. 928.725.621 |
| 2014 | 1.750.774.460 | 54,11 | 1.485.025.739 | 45,89 | 3.235.800.199 |
| 2015 | 1. 833. 317.040 | 52,64 | 1. 649. 116.750 | 47,36 | 3.482.433.790 |

Sumber : BPS Kalimantan Tengah, dari berbagai tahun terbitan (data diolah)

Selama tahun 2011-2015 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah meningkatkan belanja daerahnya tiap tahunnya. Belanja Daerah tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat pada tabel diatas.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah (Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, 2004) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama lima tahun (2011-2015) mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,38 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Proses pembangunan ekonomi daerah telah berhasil menciptakan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89 persen per tahun di provinsi kalimantan tengah.

**TINJAUAN TEORITIK / *LITERATURE REVIEW***

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Penyediaan sumber daya modal sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber dana ini diwujudkan dalam bentuk penanaman modal (Investasi). Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maupun kesempatan kerja. Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), pinjaman luar negeri serta investasi swasta asing (Sukirno, 2002).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2000 dan Smith, 2003).

1. **Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Menurut ahli - ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Pertumbuhan penduduk terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang memandang sebagai faktor produksi, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (*labour force*). Semakin banyak angkatan kerja (tenaga kerja) semakin meningkat tenaga produktif, sehingga akan meningkatkan produksi.

1. **Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik**

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik, Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input, yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah).

1. **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengertian Pengeluaran pemerintah, yaitu merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). dimana Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahtrakan rakyat/masyarakat melalui bermacam-macam program yang telah dibuat. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. (Suparmoko, 1998).

1. **Teori Kesempatan Kerja**

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (equilibrium with full employment) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan necessary condition bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, bahwa dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar.

1. **Teori Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah salah satu ukuran atau batas dipisahkannya masyarakat miskin dan non-miskin. Dalam kasus Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran kemiskinan dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau tepatnya penyesuian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin.

1. **Hubungan Pengeluaran Pemeintah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output.

1. **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja**

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar- benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

1. **Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan**

Mankiw (1995). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Sukirno (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan

kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition)*ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemisknan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Syaifuddin (2007:35) mengatakan bahwa pertumbuhan pada sektor jasa di pedesaan menurunkan kemiskinan disemua ector dan lokasi. Namun pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai *elastisitas* kemiskinan yang tinggi dari semua sector kecuali pertanian perkotaan. Selain itu pertumbuhan pertanian dipedesaan memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kemiskinan disektor pertanian pedesaan, yang merupakan kontributor terbesar kemiskinan di Indonesia.

**METODE PENELITIAN / *METHODS***

Ruang lingkup penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah dan Angkatan Kerja pada 13 kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2016, Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan dan Kemiskinan pada 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2016.

**Variabel Penelitian**

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

**a. Variabel Bebas** (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah locus of control dan kepribadian.

**b. Variabel Terikat** *(Dependent Variable)*

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas.Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja. Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang

membentuknya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi (Y2) adalah pertambahan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan dalam persen.

2) Pengeluaran Pemerintah (X1) adalah Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan dalam Persen.

3) kesempatan Kerja (X2) adalah orang yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan dalam Persen.

4) Kemiskinan (Y1) adalah Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang dinyatakan dalam persen.

Penelitian ini terbatas pada kegiatan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2010 sampai dengan 2016.

**HASIL DAN PEMBAHASAN / *DISCUSSION***

Berdasarkan perhitungan secara keseluruhan pengaruh pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibuat rangkuman sebagai berikut.

Tabel

Koefisien Analisis Jalur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hubungan Variabel | Koefisien | t hitung | P | Ket |
| Pengeluaran Pemerintah 🡪Pertumbuhan Ekonomi | 0,301 | 1,039 | 0,001 | Sig |
| Kesempatan Kerja 🡪 Pertumbuhan Ekonomi | 0,002 | 3,202 | 0,002 | Sig |
| Pengeluaran Pemerintah 🡪 Kemiskinan | 0,025 | 0,696 | 0,008 | Sig |
| Kesempatan Kerja 🡪 Kemiskinan | 0,072 | -2,043 | 0,004 | Sig |
| Pertumbuhan Ekonomi 🡪 Kemiskinan  Pengeluaran Pemerintah🡪>Pertumbuhan Ekonomi🡪Kemiskinan  Kesempatan Kerja 🡪 Pertumbuhan Ekonomi 🡪 Kemiskinan | -0,631  -0.013  -0,038 | -3,578  -0.724  1.918 | 0,001  0.018  0.020 | Sig  Sig  Sig |

Persamaan dalam penelitian ini akan melakukan estimasi terhadap **pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.** Berdasarkan hasil analisis jalur untuk pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan gambar dan diuji dengan menggunakan *Sobel Test* dengan rumus sebagai berikut:

**0,008**

Pengeluaran Pemerintah

(X1)

Pertumbuhan Ekonomi

(Y1)

Kemiskinan

(Y2)

**0,001**

**0,001**

**0,002**

Kesempatan Kerja

(X2)

**0,004**

**Gambar 5.6**

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah**

Rumus *Sobel Test* sebagai berikut :

**Sab =** b2Sa2 + a2Sb2+Sa2b2

Keterangan:

a : Koefisien *direct effect* X terhadap Y

b : Koefisien *direct effect* Y terhadap Z

Sa : Standar *error* dari koefisien a

Sb : Standar *error* dari koefisien b

Berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*)untuk pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan *Sobel Test* untuk pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Sab = b2Sa2 + a2Sb2+Sa2b2

= -0.6312 x 0.020 + 0.0212 x 0.1762 + 0.0202 X – 0.6312

= 0.002 + 0.00001 – 0.0002

= 0.0003

= 0.018

Z = ab/Sab

= -0.013/0.018

= -0.724

Berdasarkan hasil *Sobel Test* untuk pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai Z= -0.724 < 1.96, sehingga H0 diterima, artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi, sehingga ada kecenderungan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan.

1. Pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan *Sobel Test* untuk pengaruh kesempatan kerja terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

Sab = b2Sa2 + a2Sb2 + Sa2b2

= -0.6312 x 0.0202 + 0.0212 x 0.1762 + 0.0202 x – 0.6312

= 0.0001 + 0.00012- 0.0001

= 0.0004

= 0.020

Z = ab/Sab

= -0.038/0.020

= 1.918

Berdasarkan hasil *Sobel Test* untuk pengaruh pengeluaran perkapita terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai Z= 1.918 > 1.66, sehingga H0 ditolak, artinya kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi pada taraf signifikan 10%.

**KESIMPULAN / *CONCLUSION***

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

**DAFTAR PUSTAKA / *REFERENCES***

Arsyad, Lincolin dan Soeratno, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,* Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis,* Edisi Pertama, Cetakan Keenam, BPFE, Yogyakarta.

Gujarati,D.1999. *Essential of Econometrics.*, McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.

Iradian, Garbis, 2005, “Inequality, Poverty and Growth : Cross-Country Evidence”*,* *IMF Working Paper*.

Jamco, Muhammad Taher, 2008, “Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, 2002-2006”*, Tesis S2,* Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Jongwanich, Juthathip, 2007, *Worker’s Remittances, Economic Growth and Poverty in Developing Asia and Pacific Countries,* United Nation Economic and Social Commission for the Asia and Pacifics Countries (UNESCAP) Working Paper.

Kementrian Koordinator Bidang Kesra, 2008, *8 Walikota Tolak Program Penanggulangan Kemiskinan,* [www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id)

Kifli, Sofia, 2007, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Lampung, Tahun 2000–2005”*, Tesis S2,* Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Kim, Sung Tai.1997. “The Role of Local Public Sectors in Regional Growth in Korea”, A*sian Economic Journal*, Vol.11 No.21, 155-168

Kuncoro, Mudrajad, 2006, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan,* Edisi ke-4, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mangkoesoebroto, Guritno,1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3*,* Yogyakarta.

Miller, Stephen. M and Frank,Russek S.1997. “Fiscal Structure and Economic Growth at The State and Local Level”, *Public Finance Rivew*, Vol.25 No.3, 213-237.

Nopirin, 1999. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro*, BPFE, Yogyakarta.

Raminta, 2003, “Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 1999-2000, Studi Kasus di Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman”*, Tesis S2,* Program MEP UGM.

Republik Indonesia, 1999. *Undang-undang Otonomi Daerah*, Kuraiko Pratama, Bandung

Sumodiningrat, Gunawan, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat,* Pena Kencana Nusadwipa, Jakarta.

Suryahadi, Asep, Daniel Suryadarma dan Sudarno Sumarto, 2006, “Economic Growth and Poverty Reduction : The Effect Of Location and Sectoral Components Of Growth”*, Working Paper*, SMERU Research Institute, Jakarta.

Sukirno, S. (2004) *Pengantar Makro Ekono-mi*. Jakarta: Jakarta Press.

Suparmoko (2004) *Keuangan Negara dalam* *Teori dan Praktek, Edisi ketujuh.* Yogya-karta: BPFE.

Sjafrizal and ML Jhingan., 2009, *Perencanaan Pembangunan,* Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,* Edisi Ke-8, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, M.P, 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Cetakan Keempat, Jakarta

Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,* Edisi Ke-8, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., 2006, *Pembangunan Ekonomi,* Edisi Terjemahan, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Widarjono, Agus, 2007, *Ekonometri dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis,* Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta.

Widodo, Tri, 2006, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta